

EDISI : SELASA, 09 - April 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG



Nama Media : *DenPost*

Kategori : *Pertanian*

## Rencana Proyek Irradiator Gamma di Gerokgak Dibutuhkan Anggaran Rp 156 Miliar

Singaraja, DenPost

Tim Terpadu Kabupaten Buleleng tahun ini sudah mengirim proposal untuk pembangunan Irradiator Gamma di Buleleng. Dalam rancangan pembangunan gedung dan pengadaan alat pengawet itu diperlukan anggaran sebesar Rp 156 miliar. Proposal yang disusun oleh tim terpadu itu sudah diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, I Made Sumiarta, Senin (8/4) kemarin, menjelaskan, proposal pembangunan irradiator gamma sudah sampai ke meja Bappenas. Bahkan beberapa waktu lalu, proyek yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Buleleng, bersama Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Perindustrian,

Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup itu, sudah sempat melakukan audiensi dengan pejabat pusat.

Sementara itu rencana pembangunan irradiator gamma jika sudah mendapatkan persetujuan pusat sudah disiapkan lahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak seluas 22 hektar. Lahan yang kini digunakan sebagai Balai Benih Gerokgak milik Pemprov Bali, sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk pembangunan irradiator gamma.

"Proposalnya sudah kami ajukan dibawah koordinir Bappeda dan sudah audiensi juga ke Bappenas. Mudah-mudahan tahun 2020 nanti, proposal ini bisa ditindaklanjuti dan mendapat kejelasan," kata Sumiarta. Proyek besar untuk mengangkat hasil pertanian, peternakan dan olahan pangan di Buleleng ini sesuai dengan

rancangan akan dikomersilkan.

Proses pengawetan yang masuk ke gudang irradiator gamma dipas-tikan akan berjumlah besar. Tak menutup kemungkinan buah, sayur, gading dan juga bahan olahan lainnya dari luar Bali dapat masuk dan diawetkan dengan proses penyinaran alat sehingga bisa tahan lebih lama 2-3 bulan.

"Tak hanya Bali, tetapi buah dan produk pertanian, daging dan olahan dari Jatim, NTB, NTT bisa masuk ke sini. Karena produksi buah khususnya di Buleleng kebanyakan yang musiman. Di Indonesia juga baru ada dua, di Serpong dan di Yogyakarta," imbuh Sumiarta.

Selanjutnya irradiator gamma juga sudah dirancang akan dikelola oleh Perusahaan Daerah, sehingga dapat bekerjasama dengan petani dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangnya. (118)



Nama Media :

Denpost

Kategori :

APBD

## Pembahasan LKPJ APBD 2018

# Dana BKK "Disulap" Jadi Bansos

**Singaraja, DenPost**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018 mulai dibahas DPRD Buleleng Senin (8/4) kemarin. Dalam pembahasan di tingkat komisi terungkap, pos dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Badung realisasinya nol persen. Padahal dalam APBD, program itu dianggarkan dengan nilai total lebih dari Rp 22,5 miliar.

Selain itu, sejak ditetapkan anggaran itu merupakan BKK, namun dalam penjabaran APBD dana itu berubah menjadi bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai. Di mana nilainya Rp 50 juta untuk setiap kepala keluarga (KK) penerima. Rinciannya, Kecamatan Seririt 60 unit, Kubutambahan 68, Gerokgak 65, Sukasada 41, Tejakula 48, Sawan 55, Banjar 52, dan Kecamatan Busungbiu 51 unit.

Anggota Komisi III yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Putu Tirta Adnyanak Senin (8/4) kemarin, mengatakan, tidak teralisasinya BKK itu menunjukkan pemerintah daerah kurang cermat saat menyusun perencanaan anggaran. Bahkan dewan tidak mendapat penjelasan dengan terperinci mulai alokasi anggaran, siapa penerima manfaat dan pelaksanaannya.

"Kalau anggarannya tidak terealisasi, memasuki pelaksanaan anggaran perubahan pemerintah sudah menyampaikan kepada dewan untuk dibahas. Namun kenyataannya, setelah pelaksanaan APBD berakhir dan memasuki pembahasan LKPJ,

pemanfaatan BKK baru diketahui tidak bisa direalisasikan sampai nol persen. Perencanaan dan dalam APBD 2018 anggarannya dicantumkan. Bagaimana pelaksanaan, siapa penerima manfaat selama kami ditugaskan di Banggar tidak pernah ada itu. Dan setelah kami pelajari LKPJ dan disusul APBD 2018 BKK itu realisasinya nol persen," bebernya.

Selain realisasi BKK nol persen, Tirta Adnyana juga heran jatah anggaran BKK yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Badung tersebut setelah dijabarkan dalam pelaksanaan APBD 2018 diubah menjadi bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang tunai. Atas perubahan ini, dia heran mengapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam bentuk BKK, justru bisa "disulap" menjadi bansos.

Pasalnya, pos anggaran dalam bentuk BKK sifatnya kepentingan khusus dan jenis kegiatannya sudah ditetapkan. Selain itu, BKK dimohon berdasarkan proposal dari penerima yang diajukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, bansos sifat bantuannya tidak dilakukan terus menerus dan penentuan pihak penerimanya selektif. "Kalau di perencanaan dan penjabaran APBD tercantum BKK, tetapi dalam LKPJ lalu berubah menjadi bansos. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi, karena baru saya ketahui setelah membaca dokumen keuangan ini," katanya.

Tirta Adnyana akan menyikapi "disulapnya" dana BKK menjadi bansos itu setelah membahas dengan anggota komisi dan tim pakar dalam pembahasan selanjutnya. (118)



Media : *Denpost*

Kategori : *Kerjasama UN*

## Putu Agus Suradnyana Optimalkan Pemeliharaan Jalan



DenPost/robin

**Putu Agus Suradnyana**

**BUPATI** Buleleng, Putu Agus Suradnyana, memerintahkan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buleleng, untuk mengoptimalkan pemeliharaan jalan-jalan yang berstatus jalan kabupaten. Langkah itu diambil untuk menjaga kondisi jalan agar tetap baik, serta untuk menjamin usia pakai jalan

yang lebih lama.

Hal itu harus dilakukan mengingat saat ini banyak jalan kabupaten yang sudah dihotmix, namun rawan mengalami kerusakan akibat minimnya pemeliharaan. Terutama saluran air yang ada di bahu jalan. Saat ini hampir semua jalan-jalan yang berstatus jalan kabupaten sudah dilakukan pengaspalan

hotmix. Namun, upaya pemeliharaan bahu jalan terutama di saluran-saluran air yang ada di sekitarnya masih minim. "Jalan-jalan yang kami bangun banyak yang umurnya tidak sesuai dengan harapan. Idealnya tujuh tahun, tapi ini tiga atau empat tahun sudah ada yang rusak, karena pemeliharaan jalan masih lemah," ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakan, kerusakan jalan yang tidak sesuai dengan usia jalan ideal tentu akan membebani APBD Kabupaten Buleleng. Menurutnya, anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan baru, akhirnya harus dialihkan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Terkait dengan kerusakan jalan di beberapa titik di Buleleng, bupati asal Desa Banyuatis ini meminta masyarakat untuk dapat membicarakan hal itu sesuai dengan mekanisme. Dirinya tidak menampik jika masih ada beberapa ruas jalan kabupaten yang belum diaspal atau diperbaiki, namun dirinya berkomitmen akan menuntaskan permasalahan jalan tersebut. **(bin)**